

3-09-02



MILIK PERPUSTAKAAN
KS PROPINSI SUMBAR



Katalog BPS : 3401.13

11
00

STATISTIK
TERA BARAT

Ringkasan Eksekutif

INFORMASI KETENAGAKERJAAN 2000



<https://sumbar.bps.go.id>

BPS

Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat



MILIK PERPUSTAKAAN

KS PROPINSI SUMBAR

INFORMASI
KETENAGAKERJAAN
2000

Ringkasan Eksekutif

Nomor Publikasi :

Naskah :

INFORMASI KETENAGAKERJAAN 2000

Diterbitkan Oleh :

...

KATA PENGANTAR

Dalam usaha memanfaatkan hasil Susenas 2000, agar dapat memberikan kegunaan yang lebih nyata bagi pembangunan di bidang kependudukan, Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat memandang perlu untuk melakukan analisa yang berbentuk Ringkasan Eksekutif Informasi Ketenagakerjaan, dengan harapan dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan di Sumatera Barat.

Ringkasan Eksekutif ini merupakan suatu informasi bagi mereka yang bergerak dalam bidang kependudukan dan ketenagakerjaan, serta mereka yang mempunyai minat terhadapnya. Terlebih lagi minat masyarakat terhadap masalah ketenagakerjaan telah berkembang dengan cepat di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bersikap tanggap terhadap suatu masalah penting yang dihadapi oleh bangsanya sendiri.

Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penerbitan ini, kami ucapkan terima kasih. Akhirnya kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang sangat kami harapkan.

Padang, Desember 2001

Badan Pusat Statistik
Propinsi Sumatera Barat,
Kepala,



Drs. LUKMAN ISMAIL, MA
NIP. 340004379

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Pendahuluan	1
II. Penduduk Usia Kerja	2-7
II. 1. Komposisi Penduduk	2-4
II.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	4-7
III. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	8-10
III.1. Lapangan Usaha	8-9
III.2. Status Pekerjaan	9-10
IV. Tingkat Pengangguran	11-14
IV.1. Setengah Pengangguran	11-13
IV.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	13-14
(Ringkasan Data)	15
Daftar Pustaka	16-17

1. PENDAHULUAN

Dalam perencanaan ketenagakerjaan sangat dibutuhkan data yang dapat dipercaya dan rinci mengenai karakteristik angkatan kerja dan struktur penyebaran tenaga kerja. Sampai saat ini sumber data yang dapat memberikan informasi ketenagakerjaan yang lebih rinci dengan ruang lingkup yang cukup luas adalah yang survey-survey dilaksanakan oleh BPS, melalui Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Tidak semua data dari sumber-sumber tersebut dapat dibandingkan dalam melihat perkembangan dan perubahan partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan dalam konsep dan definisi serta tidak keseragaman dalam klasifikasi lapangan usaha dan jabatan.

Data mengenai ketenagakerjaan di Indonesia terlihat cukup lengkap dan dikumpulkan sejak dasawarsa 1970 - an, yaitu Sensus Penduduk 1971 telah diperkaya dengan data ketenagakerjaan.

Sumber Data Ketenagakerjaan Diperoleh Melalui Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

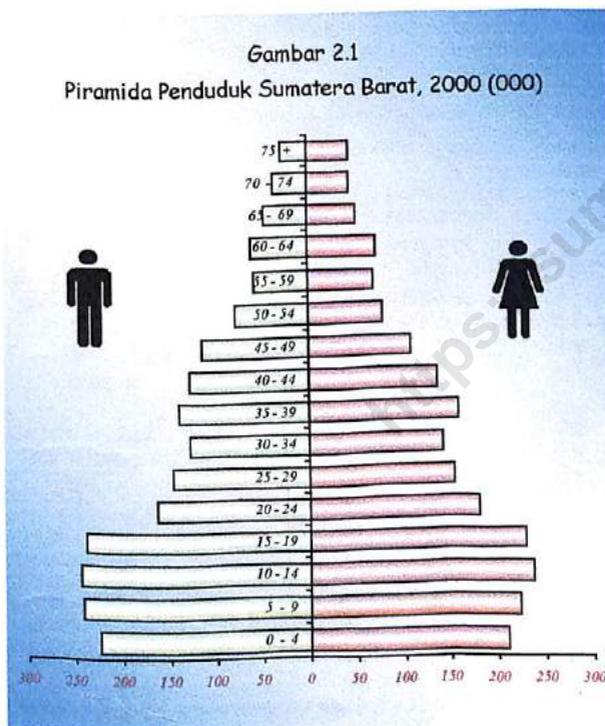
Selain itu karakteristik ketenagakerjaan ini juga dikumpulkan dalam beberapa waktu melalui Susenas yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahunnya.

Dengan menggunakan data Susenas, untuk tingkat nasional fenomena ketenagakerjaan telah banyak dikupas dalam surat-surat kabar, di dalam forum terbatas oleh ahli-ahli di BPS dan dibahas oleh Pakar Asing. Namun, masih terasa jarang tulisan-tulisan berdasarkan analisa data yang memusatkan perhatian dalam masalah-masalah ketenagakerjaan dan membahas nya secara mendalam di tingkat propinsi. Ringkasan Eksekutif Informasi Ketenagakerjaan ini tujuannya untuk mengisi kekosongan itu dengan memakai data Susenas 2000, antara lain seperti kondisi penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, lapangan kerja, status pekerjaan dan jam kerja.

2. PENDUDUK USIA KERJA

2.1. Komposisi Penduduk Usia Kerja

Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai 15 Daerah Tk.II, merupakan salah satu propinsi dengan pertumbuhan penduduk yang rendah. Menurut hasil Sensus Penduduk 1990 jumlah penduduk Sumatera Barat sebesar 4.200.007 jiwa, sedang dari hasil Sensus Penduduk 2000 sebesar 4.241.605 jiwa .



Kesan pertama yang cukup menarik dari Gambar 2.1, yaitu gambaran komposisi penduduk menurut jenis kelamin terlihat berimbang untuk setiap kelompok umur.

Jumlah Penduduk Perempuan lebih Besar Pada Kelompok Usia Menengah (15 - 49 tahun)

Persentase penduduk laki-laki sebesar 49,06 % dan perempuan 50,94 %. Terlihat perbedaan yang kecil pada umur-umur tertentu, misalnya persentase laki-laki lebih tinggi pada kelompok umur muda (0 - 14 tahun) yaitu 51,43 %, sebaliknya persentase perempuan lebih tinggi pada kelompok umur menengah (15 - 49 tahun) yaitu 51,37 % .

Untuk keperluan pengumpulan data statistik, batasan usia kerja yang berlaku adalah 10 tahun keatas. Batasan itu sebenarnya tidak sejalan dengan peraturan atau perundang-undangan berbagai bidang lainnya, seperti bidang ketenagakerjaan (15 tahun) dan bidang kesejahteraan anak. Batasan 10 tahun, sebenarnya tidak sejalan dengan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang baru saja dicanangkan pemerintah. Walaupun demikian penetapan usia kerja 10 tahun juga, dilain pihak, menguntungkan karena dimungkinkan di peroleh data pekerja atau buruh anak yaitu pekerja yang menurut definisi ILO berumur kurang dari 15 tahun.

Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk usia kerja mengalami sedikit penurunan dari tahun 1999 - 2000, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk usia kerja berkurang dari 3,58 juta jiwa pada tahun 1999 menjadi sekitar 3,32 juta jiwa pada tahun 2000 atau berkurang sekitar 7,26%.

Pertumbuhan Penduduk Usia Kerja berkurang 7,26 persen

Tabel 2.1 :
Komposisi Penduduk Usia Kerja
Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan

Jenis Kelamin Jenis Kegiatan	Banyaknya (000)		Kenaikan 1999-2000 [(3) - (2)] / (2) x 100]
	1999	2000	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Laki-laki	1723.3	1605.3	-6.8
1.1. Angkatan Kerja	1195.2	1066.0	-10.8
- Bekerja	1134.6	1035.0	-8.8
- Mencari Kerja	60.6	31.0	-49.0
1.2 Bkn. Angk. Kerja	528.1	539.3	2.1
- Sekolah	384.2	362.4	-5.7
- Mengurus Rmtg.	7.6	6.5	-14.4
- Lainnya	136.2	170.4	25.1
2. Perempuan	1854.8	1716.5	-7.5
2.1. Angkatan Kerja	821.1	641.8	-21.8
- Bekerja	764.6	613.9	-19.7
- Mencari Kerja	56.5	27.8	-50.8
2.2. Bkn. Angkatan Kerja	1033.7	1074.7	4.0
- Sekolah	424.2	382.8	-9.7
- Mengurus R. Tangga	486.8	548.3	12.6
- Lainnya	122.8	143.6	17.0
Total	3578.1	3321.8	7.2

Relatif tingginya jumlah penurunan penduduk usia kerja, terjadi sebagai konsekuensi dari perubahan kelompok umur penduduk Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut.

Jika Tabel 2.1 diperhatikan secara seksama maka akan tampak perbedaan komposisi penduduk usia kerja menurut jenis kelamin. Pertama, jumlah penduduk usia kerja ternyata lebih besar untuk wanita dari pada laki-laki. Ini terjadi pada tahun 1999 maupun 2000. Kedua, kelompok angkatan kerja, yaitu mereka yang tergolong "bekerja" dan "mencari pekerjaan", jauh lebih tinggi untuk laki-laki dari pada untuk wanita. Pada tahun 2000, misalnya, angkatan kerja laki-laki 1.066,0 ribu jiwa atau 62.42 persen dari penduduk usia kerja laki-laki, sementara jumlah angkatan kerja wanita hanya 641,8 ribu jiwa atau 37,58 persen dari penduduk usia kerja wanita. Relatif rendahnya proporsi tersebut (atau TPAK) untuk wanita terjadi karena proporsi yang mengurus rumah tangga bagi mereka relatif sangat tinggi pada tahun 2000, mencakup 31,94 persen dari keseluruhan penduduk usia kerja wanita. Sebagai perbandingan proporsi tersebut untuk laki-laki pada tahun yang sama kurang dari satu persen.

Tabel 2.2 memperlihatkan bahwa dari 1,71 juta penduduk angkatan kerja, 96,56 persen adalah penduduk yang bekerja. Penyerapan tenaga kerja terbesar adalah pada tingkat pendidikan SD / tidak tamat SD, yaitu sebanyak 9,16 ribu lebih atau 56,43 persen. Bagi lulusan Akademi/ Universitas yang bekerja hanya sebesar 4,15 persen. Hal ini menunjukkan suatu gambaran, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan akan lebih memilih jenis pekerjaan yang diminati.

Tabel 2.2.
Penduduk Angkatan Kerja
Menurut Pendidikan, 2000 (000)

Pendidikan	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Mencari Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Sekolah	51.6	-	51.6
Tdk/Tamat SD	916.9	12.4	929.3
SMTp	259.6	9.4	224.4
SMTA	202.8	21.7	139.9
SMTA Kej./D1/D2	132.8	7.1	139.9
Akd/Universitas	75.4	8,2	83,59
Jumlah	1648.9	58,8	1.707,7

Selain penduduk bekerja, yang termasuk ke dalam Angkatan Kerja adalah yang mencari pekerjaan. Pencari kerja terbesar berpendidikan SMTA, yakni 21,7 ribu (36,84 persen) kemudian diikuti dengan pendidikan SD kebawah sebesar 12,4 ribu (21,17 persen).

Penyerapan Tenaga Kerja Terbesar adalah pada Tingkat Pendidikan SD/ Tidak Tamat SD, Yaitu Sebanyak 9.16 ribu atau 56,43 persen

2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

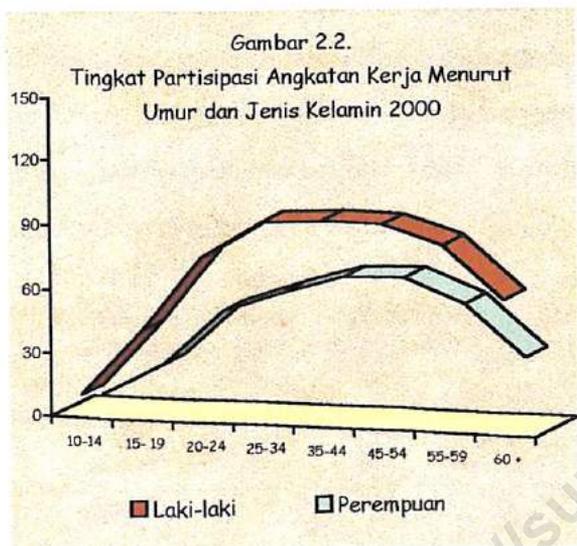
Tenaga Kerja (Man Power) merupakan unsur utama di dalam proses produksi barang dan jasa serta mengatur sarana produksi untuk menghasilkan sesuatu. Anggapan ini didasarkan pada asumsi bahwa karena manusialah yang dapat menggerakkan suatu kombinasi semua sumber - sumber produksi tersebut untuk menghasilkan barang (Simanjuntak, P.J. 1981).

Perlu diingat bahwa istilah partisipasi angkatan kerja berbeda dengan istilah partisipasi kerja. Partisipasi angkatan kerja berarti keikutsertaan dalam atau menjadi angkatan kerja. Jadi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjuk kepada persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Sebaliknya Partisipasi kerja berarti keikutsertaan dalam atau mempunyai pekerjaan (Employment Rate).

TPAK biasanya rendah untuk kelompok usia muda, kemudian naik secara bertahap sejalan dengan kenaikan umur, sebelum akhirnya turun karena pengaruh usia lanjut.

Pola umum seperti itu juga berlaku di Sumatera Barat sebagaimana tampak pada Gambar 2.2. . Pada gambar itu tampak bahwa TPAK relatif lebih rendah pada kelompok usia 10 - 14 tahun Hal ini dapat dipahami karena penduduk pada usia ini sebagian besar masih berstatus sekolah tanpa melakukan kegiatan ekonomi sama sekali.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Relatif Sangat Rendah Pada Kelompok Usia 10 - 14 Tahun



Sebagai catatan, anak yang berstatus sekolah tetapi melakukan kegiatan ekonomi paling sedikit satu jam dalam seminggu, perdefinisi akan tergolong sebagai angkatan kerja. Gambar 2.2. memperlihatkan bentuk huruf " U " terbalik. Pola U terbalik sangat selaras dengan hipotesa tentang siklus penghidupan (life cycle), yakni manusia pada awal usianya kurang produktif, demikian pula pada waktu

usia lanjut, akibatnya mereka tidak sempat mempunyai tabungan, sebaliknya pada usia menengah manusia itu sangat produktif sehingga mempunyai pendapatan yang tinggi dan tabungan yang positif. Seperti terlihat pada Gambar 2.2., TPAK mengalami kenaikan cepat dari kelompok usia 10 - 14 ke usia 15 - 19 dan hal itu berlaku baik untuk laki-laki maupun wanita. TPAK naik terus pada kelompok usia berikutnya sebelum mencapai puncaknya pada kelompok usia 35 - 44 tahun bagi laki-laki atau kelompok 45 - 54 bagi wanita. Sepertinya pola TPAK wanita lepas dari pengaruh masa-masa kemakmuran relatif sebelum anak-anaknya lahir dan sesudah anak-anaknya cukup untuk mencari nafkah sendiri . Pola semacam itu wajar untuk diharapkan karena selama masa usia sebelum 45 tahun mereka sibuk memelihara dan membesarkan anak, sedangkan setelah usia 45 tahun anak telah dewasa untuk melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena ada masa-masa tertentu bagi wanita mempunyai kecenderungan untuk keluar dari angkatan kerja, paling tidak untuk sementara waktu .

Tabel 2.3. memberikan informasi tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Daerah Tk.II, yang menunjukkan adanya variasi yang nyata pada masing-masing Daerah Tk.II. Rentang TPAK terletak antara 43,02 persen untuk Kabupaten Pesisir Selatan dan 59,15 persen untuk Kabupaten Pasaman. Tingginya TPAK di Kabupaten Pasaman diasumsikan banyaknya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, terutama perkebunan, suatu hal yang jelas berdampak terhadap TPAK secara keseluruhan di kabupaten tersebut.

Tabel 2.3 :
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Menurut Daerah Tk.II, 2000

Daerah Tingkat II	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
Pesisir Selatan	61,40	25,31	43,02
Solok	69,0	42,84	55,89
Swl./Sijunjung	74,53	41,61	58,44
Tanah Datar	67,78	40,47	53,30
Pdg. Pariaman	61,64	31,70	45,62
Agam	66,67	40,96	53,00
Limapuluh Kota	74,26	45,15	58,93
Pasaman	69,95	48,39	59,15
Kota			
Padang	60,15	28,27	43,78
Solok	61,25	28,45	44,35
Sawahlunto	70,30	37,09	52,86
Pdg. Panjang	63,71	36,47	49,85
Bukittinggi	66,93	40,95	53,13
Payakumbuh	68,12	40,42	53,78
Sumatera Barat	66,41	37,39	51,41

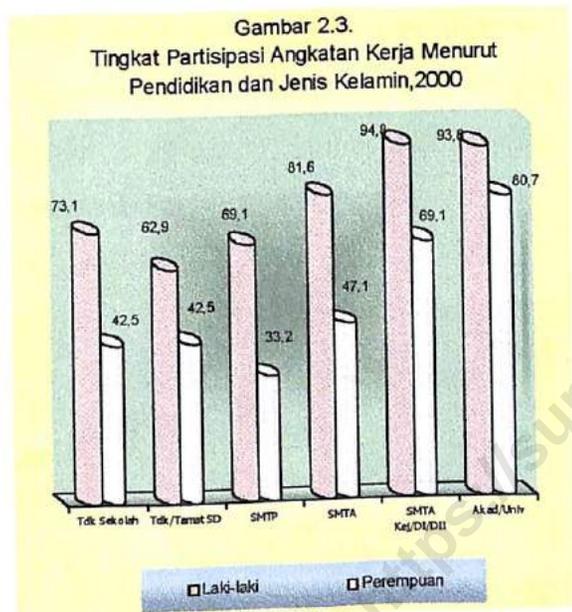
Rentang TPAK Menurut Daerah TK.II Terletak Antara 43,02 Persen Sampai Dengan 59,15 Persen

Rendahnya TPAK di Kota Padang yaitu sebesar 43,78 persen tampaknya lebih sukar untuk di jelaskan apalagi jika diingat bahwa " tingkat kemakmuran " penduduk Dati II tersebut cukup tinggi dan lapangan kerja di luar sektor pertanian sangat beragam. Secara spekulatif gejala itu barang kali dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, dengan tingkat kemakmuran yang cukup tinggi (walaupun tidak merata) cukup besar proporsi penduduk usia muda yang masih berstatus sekolah (termasuk kuliah atau walaupun tidak, mereka masih "mampu" menganggur karena memperoleh dukungan ekonomi orang tua) Kedua, lapangan pekerjaan formal diluar sektor pertanian umumnya membutuhkan pendidikan atau keterampilan yang tinggi, pada hal suatu tuntutan yang belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh kualitas penduduk Kota Padang . Alternatif lapangan pekerjaan yang tersedia disektor informal yang tentunya relatif lebih sukar dimasuki dari pada lapangan kerja di sektor pertanian terutama bagi wanita. Jadi masalahnya berkaitan dengan struktur lapangan yang tersedia.

Pada gambar 2.3 nampak bahwa secara umum TPAK berkaitan positif dengan tingkat pendidikan : semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi TPAK. Hal ini berlaku untuk laki - laki maupun wanita. Lebih rendahnya TPAK bagi yang " tamat SMTA " dari pada TPAK yang " tamat Akademi/ Universitas " mungkin berkaitan dengan

TPAK Akan Semakin Tinggi Pada Tingkat Pendidikan Yang Lebih Tinggi

perbedaan perilaku mereka dalam menerima pekerjaan .Mereka yang "tamam SMTA" mungkin lebih bebas dari pada mereka yang "tamam" Akademi/ Universitas dalam hal menerima pekerjaan yang tersedia tanpa terlalu mengganggu perasaan gengsi mereka. Gambar 2.3 juga memperlihatkan bahwa TPAK lulusan sekolah kejuruan lebih tinggi dari pada TPAK lulusan sekolah umum untuk jenjang yang sama,suatu keadaan yang tidak mengherankan mengingat bahwa sekolah kejuruan memang lebih diarahkan untuk memasuki dunia kerja dari pada sekolah umum. Pola itu berlaku baik untuk laki-laki maupun wanita.



3. LAPANGAN USAHA DAN STATUS PEKERJAAN

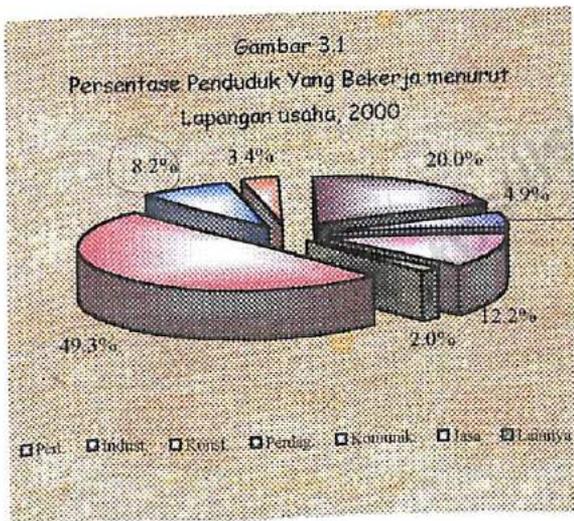
3.1. Lapangan Usaha

Pembagian penduduk yang bekerja dan perkembangannya dari masa ke masa menurut sektor sering dianalisa dengan membedakan tiga sektor pokok : Sektor A (pertanian), Sektor M (pertambangan dan galian, industri, listrik, gas dan air, konstruksi) dan Sektor S (perdagangan, komunikasi, keuangan, jasa dan lainnya). Menurut beberapa teori ekonomi, proses pembangunan biasanya disertai dengan perpindahan tenaga kerja dari Sektor A ke Sektor M dan S.

Penduduk Yang Bekerja Pada Sektor Pertanian Proporsinya Lebih Tinggi dari Pada Sektor Lainnya

Salah satu ciri dari negara berkembang antara lain, lapangan usahanya masih dominan di sektor A (pertanian). Seperti terlihat pada Gambar 3.1, 49,27 persen bekerja di sektor pertanian. Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan sekitar 20,02 persen dan sektor jasa sekitar 12,22 persen.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Squire (1981) bahwa dalam sejarah perkembangan negara-negara maju didapatkan pola bahwa sektor pertanian semakin menurun yang kemudian diimbangi oleh peningkatan peranan sektor industri dan jasa. Pada tahap selanjutnya menurut Galenson (1963) sektor jasa semakin kuat perannya untuk menggeser peranan sektor industri.

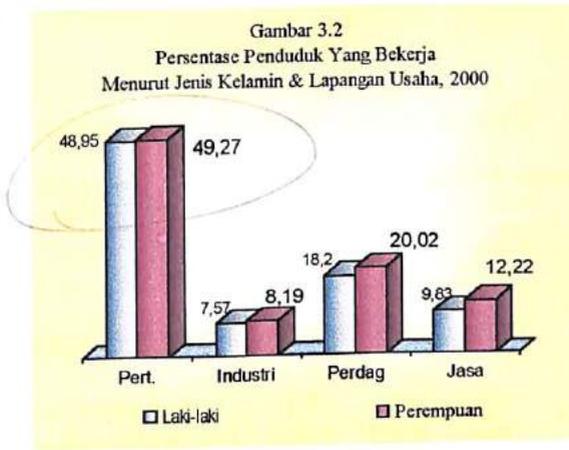


Keberhasilan strategi pembangunan sering dikaitkan dengan kecepatan pertumbuhan Sektor M yang dianggap erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas angkatan kerja.

Hal yang menarik lagi jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada Gambar 3.2, ternyata persentase wanita lebih besar dibanding laki-laki terutama sekali pada sektor industri, perdagangan dan jasa.

Keadaan ini besar kemungkinan adanya budaya merantau pada masyarakat Minangkabau terutama sekali pada penduduk laki-laki.

Persentase Wanita Yang Bekerja di Sektor Perdagangan Jauh lebih Tinggi Jika Dibandingkan dengan laki-laki



Tingginya persentase wanita dari pada laki-laki di sektor perdagangan disebabkan tingginya angka setengah pengangguran pada wanita yang diduga sebagai pekerja keluarga. Hal ini berarti jika suami sebagai pedagang maka praktis istri juga bekerja di bidang perdagangan. Namun demikian sektor industri, yang justru banyak menyerap tenaga kerja wanita, karena perkembangannya industri-industri yang dalam proses produksinya justru mengutamakan tenaga kerja wanita, misalnya industri makanan, minuman, farmasi, tekstil konveksi dan sebagainya. nampaknya tenaga kerja wanita Sumatera Barat berangsur mengimbangi peranannya terutama sekali pada sektor industri dan

jasa, seiring dengan mulai tumbuhnya industri pada perusahaan jasa yang memberikan prioritas terhadap tenaga kerja wanita.

3.2 Status Pekerjaan

Penelaahan status pekerjaan diprediksi cukup relevan untuk melihat tingkat pembangunan suatu daerah (Obrei, 1978). Cukup beralasan bilamana status pekerjaan berusaha dengan buruh tetap dan buruh atau karyawan dianggap sebagai indikator sektor moderen, yang sekaligus dapat menunjukkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan pada suatu daerah

Persamaan lapangan pekerjaan anak dan orang tua merupakan indikasi bahwa mereka bekerja disuatu rumahtangga yang dapat mewakili kegiatan-kegiatan informal tetapi ada berbagai variabel yang dapat dipakai sebagai proxy yang mengenali kegiatan tersebut. Dilain pihak Bhalla (1973 : 288) memperkirakan pekerja upahan sebagai pekerja sektor moderen dan sebaliknya pekerja keluarga digolongkan sebagai pekerja sektor tradisional.

Maka wajarlah kiranya status berusaha sendiri, berusaha dengan buruh tidak tetap atau anggota rumahtangga dan pekerja keluarga disebut proxy kegiatan sektor informal.

Tabel 3.1
 Persentase Penduduk yang Bekerja
 Menurut Status Pekerjaan Utama, 2000

Status Pekerjaan Utama	L (1)	P (2)	L+P (3)
<u>Sektor Informal</u>	66.97	71.76	68.75
Berusaha sendiri	32.85	22.41	28.96
Brusaha dibantu	24.99	13.93	20.87
Buruh tidak tetap	9.13	35.42	18.92
Pekerja tak dibayar			
<u>Sektor Modern</u>	33.03	28.24	31.25
Berusaha dibantu	3.23	0.88	2.35
Orang lain			
Buruh/Karyawan	29.80	27.36	28.90
Total	100.0	100.0	100.0

Persentase Status Pekerjaan Yang Tertinggi Bagi Perempuan Yaitu sebagai Pekerja tak Dibayar

Persentase status pekerja berusaha sendiri bagi laki-laki cukup tinggi, yaitu : 32,85 persen. Meskipun demikian mayoritas dari laki-laki mempunyai pekerjaan yang relatif modern yakni sebesar 33,03 persen, sedangkan perempuan 28,24 persen. Proporsi penduduk yang bekerja sebagai buruh atau karyawan lebih didominasi oleh laki-laki dari pada perempuan. Sebaliknya mayoritas perempuan mempunyai pekerjaan yang relatif tradisional (sektor informal), yakni sebagai pekerja keluarga dengan persentase sebesar 35,42 persen. Dari sini dapat diasumsikan bahwa rata-rata anak perempuan banyak yang bekerja mengikuti jejak orang tuanya, seperti jadi petani atau pedagang dan lainnya.

Berdasarkan Tabel 3.1 tampak bahwa penduduk laki-laki yang bekerja di sektor informal 66,97 persen lebih rendah dari pada penduduk perempuan yaitu sebesar 71,76 persen.

4. TINGKAT PENGANGGURAN

4.1. Setengah Pengangguran

Setengah pengangguran, pengangguran terbuka dan produktivitas rendah merupakan segi-segi pemanfaatan tenaga kerja kurang (under utilization) di negara-negara berkembang (Jones, 1976).

Di dalam menyoroti setengah pengangguran (under employment), gejala ini timbul biasanya karena adanya ketidak seimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu yang menimbulkan "excess supply of labor", yakni disuatu lapangan pekerjaan jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk dipekerjakan lebih banyak dibanding dengan jumlah orang yang diminta untuk bekerja. Akibat dari keadaan ini seseorang bisa bekerja kurang dari jam kerja atau hari kerja yang dapat dikerjakannya, serta ada keinginan untuk bekerja lebih banyak.

Konsep dan definisi yang sering dipakai untuk setengah pengangguran adalah seseorang yang bekerja kurang dari jam kerja normal, yakni 35 jam seminggu dan ingin menambah jam kerja.

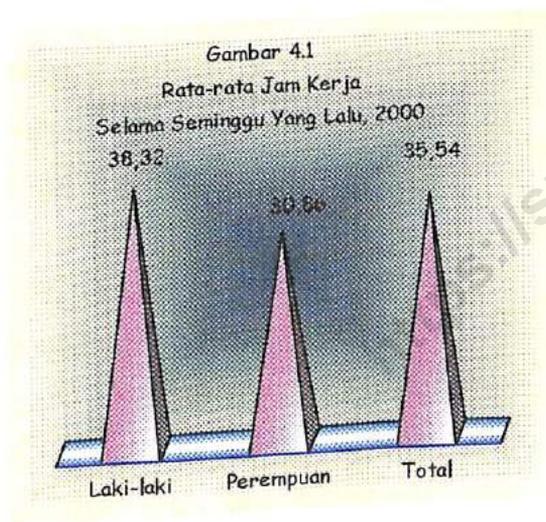
Rata - Rata Jam Kerja Selama Seminggu Bagi Wanita di Bawah Jam Kerja Normal (30,86 jam)

Sebenarnya istilah ini tidak dikatakan setengah pengangguran, selain memiliki jam kerja di bawah normal, juga melakukan hal itu karena bukan atas kemauan sendiri. Seseorang pekerja yang walaupun memiliki jam kerja rendah, katakanlah 10 jam per minggu, tetapi itu dilakukan atas kemauan sendiri, bukan setengah pengangguran. Walaupun demikian karena data yang tersedia mengenai jam kerja tidak dapat dibedakan menurut alasan memiliki jam kerja (atas kemauan sendiri atau terpaksa), maka untuk mudahnya dapat dianggap bahwa penduduk yang memiliki jam kerja rendah sebagai "setengah pengangguran" (di dalam tanda kutip).

Terdapat usaha untuk merevisi definisi tersebut agar lebih realistis dengan kondisi kita. Dalam definisi baru ini diintrodusir jam kerja normal, untuk sektor pertanian 36 jam seminggu, sedang untuk non pertanian 48 jam seminggu.

Berdasarkan dari besaran jam kerja normal tersebut tenaga kerja diklasifikasikan atas pekerja penuh dan pekerja tidak penuh, dipihak lain terdapat pengangguran penuh dan pengangguran tidak penuh (Depnaker dan Transmigrasi, 1982).

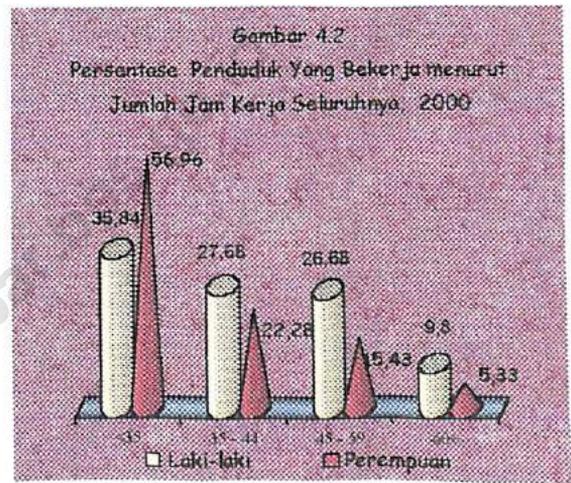
Hasil pengolahan Susenas 2000 ditemukan rata-rata jam kerja selama seminggu yang lalu sebesar 35,54 jam, dengan rincian untuk laki-laki sebesar 38,32 jam, lebih tinggi dibanding perempuan sebesar 30,86 jam (lihat Gbr. 4.1).



Secara rata-rata penduduk perempuan masih belum bisa bersaing dengan laki-laki yang bekerja sudah di atas jam kerja normal. Selanjutnya untuk lebih jelas lagi dilihat besarnya setengah pengangguran (gambar 4.2.) proporsi untuk perempuan sebesar 56,96 persen lebih besar

Tingginya Angka Setengah Pengangguran Pada Perempuan di Duga Karena Banyak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Tak Dibayar

dibanding laki-laki yakni 35,84 persen. Sejalan dengan bahasan sebelumnya, yakni tingginya angka setengah pengangguran pada perempuan, diduga banyak yang bekerja sebagai pekerja tak dibayar (unpaid family worker).



Bila dihubungkan dengan pengukuran Depnaker mengenai jam kerja normal untuk sektor non pertanian 48 jam seminggu dan sektor pertanian 36 jam seminggu, nampaknya untuk jam kerja 35 - 44 jam perbedaannya tidak begitu nyata, namun untuk jam kerja 45 - 59 jam terlihat perbedaan yang cukup tajam antara laki-laki dan perempuan.

Begitu juga untuk mereka yang bekerja sangat panjang (60 jam lebih) tetap didominasi oleh laki-laki, namun tidak mudah dipahami bila dihubungkan dengan pendapatan yang diperoleh.

Dalam hal ini Jones (1976) menyatakan bahwa pekerjaan marginal, intensitas kerja dan produktivitas kerja per jam sangat rendah, pendapatan rendah dan hanya dapat diperoleh melalui jam kerja sangat panjang. Sebagai contoh dikemukakan pedagang kaki lima, penjual keliling, tukang becak, pembantu rumah tangga dan sebagainya, yang hampir sebagian besar di daerah kota dengan pendapatan rendah tetapi jam kerja panjang.

4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah suatu besaran yang merupakan persentase dari jumlah pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa TPT lebih tinggi di daerah kota dan ternyata pula bahwa sebagian besar TPT laki-laki lebih rendah dari pada perempuan baik di daerah kota maupun kabupaten. Ini merupakan petunjuk bahwa sektor pertanian di daerah kota kurang mampu menyerap

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tertinggi Terdapat pada daerah Kota Padang (14,99 persen)

tenaga kerja dibanding dengan sektor pertanian yang hampir sebagian besar di daerah kabupaten.

Tabel 4.1.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tk.II 2000

Daerah Tingkat II	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Kabupaten</u>	1,71	2,75	2,11
01. Pesisir Selatan	2,97	3,85	3,27
02. Solok	2,78	2,90	2,83
03. Swl./Sijunjung	2,15	1,46	1,87
04. Tanah Datar	3,83	7,60	5,39
05. Pdg. Pariaman	4,37	8,31	6,08
06. Agam	2,18	3,42	2,73
07. Limapuluh kota	1,91	5,42	3,45
08. Pasaman	4,00	2,89	3,53
<u>Kota</u>	6,82	10,31	8,03
71. Padang	12,85	18,73	14,99
72. Solok	7,05	7,45	7,19
73. Sawahlunto	10,95	10,92	10,94
74. Pdg. Panjang	4,82	7,05	5,78
75. Bukittinggi	7,35	10,52	8,64
76. Payakumbuh	4,22	9,30	6,35
Sumatera Barat	5,07	6,88	5,81

Dari Tabel 4.1 tersebut nampak bahwa tenaga kerja perempuan belum mampu bersaing dengan tenaga kerja laki-laki, terutama di daerah kota, perbedaannya cukup besar.

Secara total TPT perempuan sebesar 0,88 persen dan TPT laki-laki sebesar 5,07 persen. Daerah Kota Padang menempatkan urutan TPT tertinggi sebesar 14,99 persen, didusul kemudian Kota Sawahlunto sebesar 10,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang merupakan pusat perdagangan dan pemerintah ternyata cukup tinggi TPT nya. Apalagi bila dikaji bahwa, lebih dari separoh daerah perkotaan adalah penduduk Kota Padang.

Selain pada tabel 4.2 suatu catatan penting yang perlu dikemukakan adalah angka penganggura terbuka sangat tinggi bagi kelompok usia muda dibawah usia 25 tahun. Hal itu berlaku baik bagi laki-laki maupun wanita. Sebenarnya tingginya angka itu dapat dipahami mengingat bahwa penduduk pada usia itu sebagian masih berada dalam transisi " dunia sekolah " dan " dunia kerja " suatu gejala yang ditemukan di hampir semua negara, termasuk dinegara-negara yang sudah maju.

Angka Pengangguran Terbuka Sangat Tinggi Bagi Kelompok Usia Muda di Bawah Usia 25 Tahun

Dalam masa transisi seperti itu terkadang banyak yang " mampu " untuk tidak melakukan kegiatan ekonomi (termasuk mencari pekerjaan) karena memperoleh dukungan orang tua, tetapi lebih banyak lagi yang tidak "mampu" dan terpaksa mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya.

Tabel 4.2.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur 2000

Kelompok Umur	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
10 - 14	4,52	2,41	3,75
15 - 24	15,98	18,76	18,20
25 - 44	3,02	5,50	4,06
45 - 54	0,58	0,60	0,59
55 +	0,75	0,68	0,72
Sumatera Barat	5,07	6,88	5,81

RINGKASAN DATA

Data Penduduk Sumatera Barat 2000	Susenas	Proyeksi
Laki-laki (ribuan)	2.070,6	2.272,1
Perempuan (ribuan)	2.149,2	2.385,3
Total (ribuan)	4.220,3	4.657,3
Penduduk Usia Kerja (10 Tahun keatas)		
Laki-laki (ribuan)	1.605,3	1.794,7
Perempuan (ribuan)	1.716,5	1.923,9
Total (ribuan)	3.321,8	3.718,6
Penduduk Angkatan Kerja		
Laki-laki (Ribuan)	1066.0	1.203,0
Perempuan (Ribuan)	641.8	936,3
Total (Ribuan)	1707.8	2.139,3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
Laki-laki (%)	66.41	55,42
Perempuan (%)	37.39	27,14
Total (%)	51.41	41,63
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
Laki-laki (%)	2.91	-
Perempuan (%)	4.34	-
Total (%)	3.44	-
Setengah Pengangguran		
Laki-laki (%)	35.84	-
Perempuan (%)	56.96	-
Total (%)	43,70	-

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS Propinsi Sumatera Barat), Survei Sosial Ekonomi Nasional 1999, Sumatera Barat.
- Clark, C, 1940, *The Conditions of Economic Progress*, London, Mac Milan.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, 1982, *Resume Beberapa Hasil Penelitian di Bidang Ketenagakerjaan*, Jakarta.
- Durand, J.D, 1975, *The Labor Force in Economic Development: a Comparison of International Census Data 1964 - 1966*. New Jersey, Princeton University Press.
- Galenson, W, 1963, *Economic Development and The Sectoral Expansion of Employment*, *International Labor Review*, Vol 87 : 504 - 519.
- Jones, G. dan B. Supratilah, 1976, *Undertilization of Labor in Palembang and Ujung Pandang*, *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, 12 (2) : 30 - 57.
- Kuznets, S, 1957, *Quantitative Aspects of The Economic Growth of Nation : II Industrial Distribution of National Product and Labor Force*, *Economic Development and Cultural Change*, 5 (4), Part 2 : 1 - 111.
- Oberai, A.S, 1978, *Changes in The Structure of Employment with Economic Develoment*, Geneva, International Labor Office.
- Simanjuntak, P.J, 1981, *Ekonomi Tenaga Kerja*, Jakarta . Naskah.
- Squire, Lyn, 1981, *employment Policy in Developing Countries : a Survey of Issues and Evidence*, New York, Oxford University Press.

Turnham, D, 1971, *The Employment Problem in less Developed Countries : a Review of Evidence*. Paris, Organization for Economic Co-operation and Development Employment, series no. 1.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs.
1962, *Sex and Age patterns of Participation in Economic Activities*, New York, Demographic Aspects of Man Power Report no. 1.

1968, *Methods of Analyzing Census Data on Economic Activities of The Populations*, Chapter III. New York.

<https://sumbar.bps.go.id>

Ringkasan Eksekutif ini menyajikan tentang Informasi

LABEL SEMENTARA



BLANKO LABEL SEMENTARA
SENSUS ASET TETAP

Kode UAKPB

No. Kertas Kerja

No. Urut di kertas kerja

Nama Petugas

019937

1106

1867

M
Irwansyah

PERHATIAN:

Dalam Rangka Pelaksanaan Sensus BKN di lingkungan BPS, bersama ini dimohon bantuan dari seluruh pegawai di lingkungan BPS untuk tidak memindah barang selama pelaksanaan sensus

Atas Perhatian dan Kerjasamanya diucapkan terima kasih

Penanggung Jawab UPKPB
Yomin Tofri, MA

menyediakan data bagi pemerintah dan masyarakat.

mbarkan
ambilan
Dengan
up to
ngkatan
a, dan

2000

Seksi

Propinsi

Upakan

Sanakan

ya yakni

BPS

Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 48, Telp. 442158 - 60
Fax. 442161, Padang - 25135
E-mail: bpssumbar@padang.wasantara.net.id